



KR-Antara/Mohammad Ayudha/foc

**E-KTP UNTUK PELAJAR: Petugas Dispendukcapil Sragen melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) kepada pelajar di SMK 1 Sragen, Jawa Tengah, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi Pemilu 2024 nanti akan didominasi pemilih muda di rentang usia 17-40 tahun yang diproyeksikan sekitar 110 juta penduduk atau sekitar 60 persen dari total jumlah pemilih.**

## PRESIDEN: JADILAH WASIT YANG ADIL

# MK Persiapkan Diri Sambut Pemilu 2024

**JAKARTA (KR)** - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan telah mempersiapkan diri dalam menyambut Pemilu 2024. Anwar dalam Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan 2022 di Jakarta, Rabu (24/5), mengatakan, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan tanggung jawab MK, sebagaimana amanat konstitusi.

"Untuk itu, MK terus berikhtiar dengan sebaik-baiknya mempersiapkan semua hal untuk mendukung kelancaran dan kualitas penanganan perkara PHPU," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Anwar, pada tahun 2023 MK fokus pada penyelenggaraan berbagai kegiatan, di antaranya berhubungan dengan kepemiluan, seperti bimtek

hukum acara MK, termasuk dengan seluruh parpol peserta Pemilu 2024," katanya.

Selain itu, MK juga menyelenggarakan workshop administrasi dan administrasi umum bagi para pegawai serta peningkatan sarana prasarana ICT, kemudian kesiapan fasilitas gedung untuk penanganan perkara.

Sebelumnya, Presiden Joko Wi-

dodo (Jokowi) berharap MK dapat mempersiapkan diri menjadi wasit yang adil, karena kini Indonesia memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. "Kami sangat berharap MK melakukan persiapan matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa, baik sengketa di pileg, pilpres maupun pilkada," ucap Presiden Jokowi dalam sambutannya pada sidang pleno khusus tersebut.

Ia mendorong kualitas putusan MK. Hal ini diperlihatkan dari aspek kecepatan penerbitan putusan. Pasalnya, keadilan yang tertunda terlalu lama adalah sebuah ketidakadilan. "Kita harus berusaha keras agar Pemilu 2024 dijadikan ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia, sekaligus memilih

pemimpin-pemimpin yang amanah untuk meraih tujuan berbangsa dan bernegara," pesan Presiden.

Jokowi berterima kasih kepada para hakim konstitusi dan jajaran pendukung di MK yang telah menegakkan hukum konstitusional atau *constitutional justice*. Hukum konstitusional, katanya, elemen kunci dari demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan kepastian hukum.

MK menggelar Sidang Pleno Khusus dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2022. Ketua MK Anwar Usman menjelaskan laporan tersebut mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus mahkamah serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. (Ant/San)-f

## DIMINTA SEGERA BERADAPTASI 106 Anggota KPU 20 Provinsi Dilantik

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi melantik 106 anggota KPU dari 20 provinsi di Indonesia untuk periode 2023-2028.

"Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudara bersedia diambil sumpah?" tanya Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang memimpin acara pelantikan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Para calon anggota KPU Daerah itu pun serentak menyetujui untuk diambil sumpah. "Siap," jawab para calon anggota terpilih untuk KPU Provinsi.

Untuk tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan, masing-masing terdapat tujuh orang, sedangkan 17 provinsi lainnya masing-masing terdapat lima orang. Pelantikan Anggota KPU Provinsi itu dilakukan di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Hasyim Asy'ari mengingatkan agar para Anggota KPU Provinsi itu bisa beradaptasi dengan cepat, menaati pedoman etik penyelenggara Pemilu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka bisa

tetap menjaga independensi lembaga penyelenggara Pemilu, khususnya KPU. "Kami berharap perundang-undangan, kode etik penyelenggara Pemilu dijadikan pedoman sehari-hari supaya kita tidak melenceng, tidak mudah tergiur, dan tidak mudah terpengaruh berbagai pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang," tambahnya.

Kemudian, Hasyim meminta mereka segera berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, KPU Pusat, hingga KPU Kabupaten/Kota begitu mulai bertugas. Menurutnya, komunikasi dengan pimpinan partai di tingkat provinsi, lembaga kemasyarakatan, dan media juga menjadi hal penting. "Ini menjadi sesuatu yang penting. Beradaptasi ini juga kita maknai beradaptasi dengan tahapan-tahapan yang saat ini sedang kita kerjakan," ujar Hasyim.

Hasyim meminta para Anggota KPU tersebut dapat memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. (Ant/San)-f

## Jaringan Narkotika Ikut Danai Pemilu

**DENPASAR (KR)** - Direktorat Tindak Pidana Narkotika Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berasal dari jaringan narkotika. Indikasi tersebut bukan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019.

"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada," ungkap Wakil Direktur Tindak Pidana Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Komisararis Besar Polisi (Kombes Pol) Jayadi saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta Badung Bali, Rabu (24/5).

Namun, Jayadi tidak menjabarkan secara perinci hasil temuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang telah beredar di internet. "Seperti yang kita tahu banyak anggota legislatif yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Saya tak bisa katakan persentasenya. Kalau browsing (menjelajah) di internet anggota legislatif yang terlibat itu muncul semua," katanya. (Ant/Has)-f

## KEMENKOMINFO SIAPKAN SEJUMLAH LANGKAH

# Cegah Hoaks Politik Jelang Pemilu 2024

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap beberapa langkahnya dalam mencegah hoaks terkait isu politik yang bertepatan dan merugikan masyarakat menjelang momen Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pertama kami menyiapkan edukasi dan literasi digital kepada para pemilih pemula atau first voter agar ketika mencari informasi mereka bisa aktif mencari dari sumber yang valid dan jelas," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong dalam forum diskusi daring 'Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu' di Jakarta, Rabu (24/5).

Program literasi digital kepada para pemilih pemula tersebut, lanjut Usman Kansong, merupakan bagian langkah Kemenkominfo menyukseskan visi percepatan transformasi digital nasional.

Langkah meliterasi digital para pemilih pemula ini menjadi penting agar arus informasi yang tidak benar bisa ditekankan peredarannya di masyarakat lewat media sosial karena para pemilih pemula itu akan diajarkan metode saring sebelum sharing. "Kita ajak masyarakat itu untuk

bisa kritis dengan segala informasi di media sosial, tidak langsung menyebarkan tapi mereka kita minta periksa dulu kebenarannya," ujar Usman.

Selanjutnya, Kemenkominfo menargetkan kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat di daerah terpencil, orang lanjut usia (lansia), hingga masyarakat difabel agar bisa mendapatkan akses informasi yang tepat. Salah satunya lewat pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk di daerah-daerah agar mereka bisa memberikan penyuluhan kepada kelompok rentan tersebut mengenai informasi yang benar sehingga bisa terhindar dari berita yang menyesatkan termasuk menjelang tahun politik 2024.

Kemenkominfo juga menggandeng para pemengaruh seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif secara lokal untuk bisa mengenalkan perbedaan berita benar dan hoaks kepada masyarakat di daerah-daerah. Di samping itu, Kemenkominfo mengajak pihak yang akan paling aktif terlibat yaitu elite-elite politik agar bisa mencegah penyebaran berita sesat berupa ujaran kebencian hingga kampanye hitam. (Ant/San)-d

## TINDAKLANJUT TUNGGU KEBIJAKAN GUBERNUR

# Pemda DIY Terus Tertibkan Penggunaan TKD

**YOGYA (KR)** - Penertiban terhadap penyalahgunaan perizinan di atas Tanah Kas Desa (TKD) menjadi komitmen Pemda DIY. Karena itu, Satpol PP DIY akan terus melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan TKD.

Saat ini penertiban dilakukan terhadap dua Tanah Kas Desa (TKD) yakni di Maguwaharjo, Depok, Sleman dan Girisekar, Panggang, Gunungkidul.

"Berdasarkan data yang ada, TKD di Maguwaharjo digunakan untuk agrowisata dan resto dengan luas 18.000 meter persegi dan belum berizin. Sedangkan TKD di Girisekar, sama tidak berizin dan dipergunakan juga untuk resto di atas TKD seluas 1.750 m2. Pemilik usaha sudah kami panggil dan masing-masing menyanggapi penghentian operasional," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Rabu (24/5).

Menurut Noviar, Satpol PP DIY pada Selasa (23/5) sudah bergerak untuk melakukan pengecekan yang diawali koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan perangkat kalurahan setempat. Penertiban berupa penyegelan akan dilakukan jika pemilik usaha tidak menepati janjinya. (Ria)-f

Saat petugas Satpol PP tiba di lokasi TKD Maguwaharjo, penghentian operasional ternyata telah dilakukan. Sedangkan untuk TKD di Girisekar, bahkan sudah melakukan perobohan sendiri.

"Karena keduanya sudah tidak beroperasi, tinggal saya laporkan kepada Gubernur DIY. Selanjutnya terserah kebijakan Gubernur DIY akan menempuh proses hukum atau ada sanksi administrasi lainnya. Tapi sebelum itu biasanya akan dihitung dulu kerugiannya," terangnya.

Noviar menambahkan, CV Doeloe menjadi penanggungjawab terhadap Doeloe Resto Garden yang menempati TKD di Girisekar tanpa izin. Saat perobohan bangunan yang mereka lakukan sendiri, pengawasan dilakukan oleh Satpol PP Gunungkidul, Kapanewon Panggang dan Kalurahan Girisekar. Proses pengembalian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pun dijanjikan akan dilakukan oleh CV Doeloe.

"Dalam kasus semacam ini, seharusnya Pak Lurah selaku pihak yang diberikan hak anggadhuh terhadap aset desa, bisa mengawasi penggunaan Tanah Kas Desa di wilayahnya," ujar Noviar. (Ria)-f

## INDONESIA MENARIK TUJUAN INVESTASI Dirut BRI Ungkap Optimisme Kinerja



Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan optimisme kinerja positif BRI.

**JAKARTA (KR)** - Kondisi perekonomian Indonesia yang solid, serta situasi politik dan keamanan dalam negeri yang kondusif mampu menarik minat investasi dari luar negeri. Berkaitan hal ini Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan optimisme kinerja positif BRI. Hal tersebut diungkapkan Sunarso di depan Pimpinan Redaksi Media di Jakarta, Kamis (11/5).

Sunarso mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia masih sangat menarik untuk dijadikan tujuan investasi oleh negara lain. "Maka dari itu peluang untuk capital inflow. Selama Indonesia bisa mem-provide dua hal, yang pertama adalah stabilitas dan yang kedua adalah pertumbuhan. Investasi selalu mencari dua hal, dan yang penting adalah stabilitas dulu, keamanan," jelas Sunarso.

Perseroan pun optimis pada tahun ini dapat mencatatkan kinerja lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dengan fokus bisnis tetap pada segmen UMKM, utamanya segmen mikro dan ultra mikro.

"Saat ini kondisinya sangat memungkinkan untuk mencatat-

kan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan pertumbuhan kredit kami proyeksikan mampu tumbuh di level 10 hingga 12%, didukung oleh pertumbuhan pada segmen UMKM, khususnya mikro dan ultra mikro," tambah Sunarso.

"Ketika saya bertemu investor BRI di luar negeri beberapa waktu lalu, hampir semua analis, maupun investor bertanya bagaimana situasi menjelang Pemilu? Saya jawab, Pemilu di Indonesia sudah menjadi bagian mekanisme dan saat ini masyarakat Indonesia

sudah semakin cerdas," urai Sunarso.

Sunarso juga menambahkan, mendekati tahun politik, driver dari pertumbuhan ekonomi salah satunya berasal dari kegiatan kampanye. "Jadi jawaban saya apa? Pemilu di Indonesia, karena masyarakatnya semakin cerdas pemilih di Indonesia menjadi mekanisme yang rutin. Jadi para investor maupun analis, tidak perlu cemas dengan pemilu di Indonesia," pungkasnya. (Sal)



Layanan BRI yang selalu hadir di tengah masyarakat.

KR-Istimewa